KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lagu Setuju Masih Bergema di Parlemen
Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Lagu Setuju Masih Bergema di Parlemen

Reformasi pada 1998 melahirkan parlemen yang kuat mengawasi kekuasaan. Namun, kini, kritik di Senayan justru kian kehilangan gema.

Machradin Wahyudi Ritonga dan Nikolaus Harbowo

"Wakil rakyat seharusnya merakyat/jangan tidur waktu sidang soal rakyat/Wakil rakyat bukan padaan suara/hanya tahu nyanyian lagu setuju/"

Penggalan lirik lagu Iwan Fals berjudul "Surat buat Wakil Rakyat" yang dirilis pada 1987 itu menggambarkan betapa suram potret wakil rakyat di masa Orde Baru. Nyaris tak ada suara sumbang dari parlemen yang berani mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto.

Sepanjang Orde Baru, mayoritas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikuasai partai penguasa, yakni Golongan Karya (Golkar). Dua partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hanya mendapatkan sebagian kecil kursi parlemen.

Kursi DPR periode 1992-1997, misalnya, dari 400 kursi DPR, sebanyak 282 kursi dikuasai Golkar. Adapun PPP hanya memiliki 62 kursi dan PDI 56 kursi. Begitu pula DPR hasil Pemilu 1997, dari 425 kursi DPR, Golkar menguasai 325 kursi, PPP 89 kursi, dan PDI hanya 11 kursi.

Intervensi penguasa terhadap pimpinan partai-partai politik ditengarai semakin membuat wakil rakyat sulit bersuara. Tidak sedikit pula elite parpol yang juga berada dalam kendali penguasa.

Faktor lain, sistem pemilihan legislatif masih tidak langsung. Rakyat hanya memilih partai tanpa mengetahui sosok calon wakil rakyatnya. Akibatnya, para penghuni Senayan lebih berperan sebagai representasi elite partai yang "dikebiri" rezim. Suara parlemen tak ubahnya stempel yang sekadar mengesahkan tiap kebijakan yang keluar dari Istana.

Menginjak 28 tahun Reformasi, wajah wakil rakyat seperti kembali ke era Orde Baru. Meski reformasi 1998 telah menguhah sistem pemilihan legislatif menjadi langsung dipilih rakyat, suara publik kerap diabaikan. Gelagat penguasa yang menarik partai-partai di parlemen ke dalam koalisi tunggal berkontribusi pada melemahnya fungsi pengawasan DPR.

Gejala itu sebenarnya mulai terlihat kuat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seusai Pemilu 2019, hampir semua parpol pemilik kursi di parlemen ditarik masuk ke dalam orbit kekuasaan. Partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan perlahan bergabung di barisan koalisi pendukung Jokowi dengan memercayakan kadernya di kabinet.

Koalisi pemerintahan membengkak dan menjadi sangat dominan di DPR. Di titik itu, relasi eksekutif dan legislatif berubah. DPR bukan lagi arena tarik-menarik kepentingan yang seimbang, melainkan cenderung jadi perpanjangan stabilitas politik pemerintah.

Fenomena ini semakin kentara ketika sejumlah regulasi strategis disahkan dengan kecepatan tinggi di tengah kritik publik yang luas. Di antaranya, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pola itu terulang pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu merangkul mayoritas parpol yang menjadi lawannya di Pemilihan Presiden 2024. Alhasil, tujuh dari delapan parpol di parlemen jadi pendukung pemerintah.

PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi satu-satunya parpol yang hingga kini berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai penyeimbang. Sejumlah anggota DPR dari PDI-P memang kerap melontarkan kritik tajam. Namun, dalam sejumlah kesempatan, suara PDI-P justru senada dengan pemerintah.

Posisi politik PDI-P ini berbeda dengan yang terlihat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). PDI-P yang saat itu juga berada di luar pemerintahan berani berbeda sikap saat pengambilan keputusan di DPR. Fraksi PDI-P, misalnya, menolak pengesahan RUU Pilkada yang mengembalikan sistem pilkada ke DPRD. PDI-P juga berulang kali mengkritik kebijakan fiskal pemerintahan Yudhoyono.

Dengan kondisi saat ini, mayoritas parpol mendukung pemerintahan Prabowo plus sikap gamang PDI-P, sejumlah agenda strategis pemerintah pun berjalan relatif mulus. Begitu pula dengan pengesahan sejumlah produk perundang-undangan. Semua berjalan mulus meski publik kerap menentang kebijakan atau produk perundang-undangan yang disusun.

Ironisnya, kamar sebelah, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang lahir pascareformasi dan diharapkan menjadi penyeimbang DPR justru makin kehilangan tajinya. Saat dana transfer ke daerah dipangkas, misalnya, DPD hampir tak terdengar suaranya. Padahal, DPD dibentuk untuk memperkuat representasi daerah.

Kemandekan penyaluran aspirasi publik di parlemen ini perlahan memicu kejenuhan publik. Jurang antara suara rakyat dan sikap elite politik yang nyaris tak lagi tecermin dalam perdebatan di DPR membuat lembaga ini dipandang semakin jauh dari fungsi representasinya.

Puncaknya, gelombang demonstrasi pada Agustus 2025 menjadi catatan penting bagaimana rakyat tidak hanya kesal dengan sikap diam parlemen terhadap kebijakan pemerintah dan abai terhadap suara rakyat, tetapi juga muak dengan perilaku anggota DPR yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

Dibutuhkan pengawasan

Kontrol kuat dari parlemen sebenarnya dibutuhkan Presiden Prabowo. Ini seperti disampaikannya dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026). Bagi Prabowo, demokrasi membutuhkan *checks and balances*. Hal itu pun dinilainya mulai dijalankan dengan baik oleh PDI-P.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan, semangat reformasi 1998 tetap dijaga di parlemen. Menurut dia, DPR kini menjadi semakin terbuka untuk mendengarkan kritik dan masukan publik. Fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah pun tetap dijalankan oleh alat kelengkapan DPR ataupun fraksi-fraksi di parlemen.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, mengatakan, parlemen tetap memburtuhkan kekuatan kritis yang eksis. Partai pemerintah mungkin kuat untuk menjaga stabilitas, tetapi partai di luar pemerintah harus mampu memberikan kritik yang benar-benar membunyikan suara-suara alternatif untuk kepentingan rakyat. Hal inilah yang seharusnya dipegang teguh di era Reformasi.

Meski demikian, lanjut Aria, PDI-P dalam menjalankan peran sebagai penyeimbang tidak lantas mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat tetap didukung.

Sementara itu, anggota DPD dari Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mengakui, peran DPD belum optimal memperjuangkan suara masyarakat di daerah. Masih terbatasnya kewenangan DPD jadi kendala utama. Dalam sistem legislasi, DPD tidak memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan hanya sebatas memberikan usul serta pertimbangan. Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama DPR selaku wakil rakyat dan DPD selaku wakil daerah.

Proses sembrono

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, kondisi parlemen saat ini mengingatkan pada DPR di era Orde Baru. "Dulu ada istilah anggota DPR 5D: datang, duduk, dengar, diam, dapat duit. Ini kurang lebih kembali terjadi saat ini," ujarnya.

Situasi tersebut, menurut Ray, terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satunya proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) yang dinilai sembrono dan bahkan tanpa kriteria. Hanya dengan ukuran utama popularitas dan modal, seseorang bisa menjadi caleg.

Selain itu, praktik nepotisme semakin merajalela. Tidak hanya di tingkat nasional, praktik itu juga berlaku pada tingkat legislatif di daerah. Para wakil rakyat yang terpilih dengan mengandalkan nepotisme ini umumnya kurang memahami standar etik dan filosofi anggota legislatif.

Kondisi-kondisi itu melahirkan anggota DPR yang lebih takut pada partai daripada rakyat. Ketika partai itu memutuskan mendukung pemerintah, para wakil rakyat pun terlihat sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Kala partai merdurat ke koalisi pemerintah, mereka manut saja. Kadang ada sesekali aksi rapat-rapat yang terlihat keras di komisi. Tapi, rasanya itu tidak akan ke mana-mana," kata Ray.

Ia menambahkan, satu-satunya jalan untuk memperbaiki situasi ini adalah dengan reformasi total legislatif. Bentuk, wewenang, dan keanggotaan DPR mendesak untuk didesain ulang.

Reformasi legislatif ini juga menyinggung penguatan peran DPD. Menurut Ray, posisi DPD harus diperkuat.

Jika semua ini tidak diperbaiki, harapan DPR dan DPD sebagai perwakilan rakyat di bidang legislatif akan sulit mencapai titik idealnya. Impian reformasi yang menginginkan pengawasan kekuasaan oleh para "wakil rakyat" ini pun dipudarkan oleh "nyanyian lagu setuju".



Suasana Rapat Paripurna DPR yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

